

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEPALA
DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
DESA TITI MERAH KECAMATAN LIMA PULUH
KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

OLEH:

**PUTRI DITA PRATAMA MARPAUNG
15.852.0040**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KEPALA
DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
DESA TITI MERAH KECAMATAN LIMA PULUH
KABUPATEN BATU BARA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh:

PUTRI DITA PRATAMA MARPAUNG

15.852.0040

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Putri Dita Pratama Marpaung

15.852.0040

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan

Di bawah ini:

Nama : Putri Dita Pratama Marpaung
NPM : 15.852.0040
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area bentuk menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 01 April 2019

Yang menyatakan

Putri Dita Pratama Marpaung

15.852.0040

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam
Meningkatkan Pembangunan Desa Titi Merah Kecamatan
Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

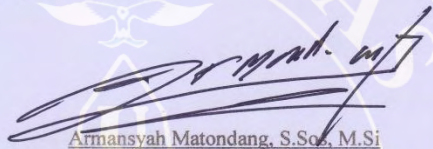
Nama : Putri Dita Pratama Marpaung

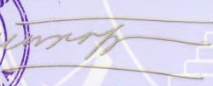
NPM : 15.852.0040

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing


Drs. Indra Muda, MAP
Pembimbing I


Armansyah Matondang, S.Sos, M.Si
Pembimbing II


Dekan

Hasmanto, MA

Ka. Prodi Administrasi Publik


Nina Angelia, S.Sos, M.Si

Tanggal Lulus : April 2019

ABSTRAK

Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Desa Titi Merah merupakan suatu desa yang berada di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Keperdulian aparat desa dalam pembangunan infrastruktur dikategorikan kurang optimal karena kurang kerjasama antara masyarakat dengan aparat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian ini adalah Kepala Desa sebagai informan kunci, dan perangkat desa sebagai informan utama serta masyarakat sebagai informan tambahan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan desa yang baik belum sepenuhnya terwujud, hal ini dilihat dari kinerja Kepala Desa belum berjalan dengan baik. Masyarakat mengatakan Kepala Desa dan pemerintah desa belum sepenuhnya mewujudkan kinerja pemerintah desa serta pembangunan desa yang baik. Dan faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan kinerja Kepala Desa yaitu kurang koordinasi antara Aparat Desa dalam menanggapi masalah yang terjadi di masyarakat.

Kata kunci: Persepsi, Kinerja, Kepala Desa

ABSTRACT

Community Perceptions Of The Performance Of The Village Head In Improving The Development Of The Titi Merah Village In The District Of Fifty Coal Districts

Titi Merah village is a village located in the sub-district of fifty coal districts. The concern of the village apparatus in infrastructure development is categorized as less than optimal due to lack of cooperation between the community and the village apparatus. This study aims to determine community perceptions of the performance of village heads in improving development and the factors that influence community perceptions of village head performance. This research uses qualitative methods. The informants of this research are the village head as the key informant, and the village apparatus as the main informant and the community as additional informants. The results of the research show that the performance of village heads in improving good village development has not yet been fully realized, this is seen from the performance of village heads that has not gone well. The community said the village head and village government had not fully realized the performance of the village government as well as good village development. And factors influencing the implementation process of the village head's performance, namely lack of coordination between village officials in responding to problems that occur in the community.

Keywords: Perception, Performance, Village Head

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada program studi Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyak kendala dan rintangan yang dihadapi penulis. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Drs. Indra Muda, MAP selaku dosen pembimbing I saya yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan dan motivasi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Armansyah Matondang, S.Sos, M.Si selaku dosen pembimbing II saya yang banyak memberikan arahan terhadap penulisan skripsi dan motivasi yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu penyelesaian studi pada Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area, yaitu:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua saya, Alm. Ayahanda Dirhamsyah Marpaung dan Ibunda Sri Juswita atas pengorbanannya selama ini kepada penulis, baik dari segi materi maupun non materi serta atas segala doa yang terbaik dan kasih sayangnya yang tak terhitung sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan selama perkuliahan terutama selama menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Heri Kusmanto, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
3. Ibu Dra. Hj. Rosmala Dewi, MPd, selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Chairika Nst, S.AP, MAP selaku sekretaris skripsi saya yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program studi Administrasi Publik yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan serta staf pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
6. Bapak Darmawi selaku Kepala Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di Desa Titi Merah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh staf di Kantor Kepala Desa Titi Merah yang telah membantu penulis dalam proses administrasi.

8. Teristimewa untuk adik saya Ilham Zuhdyawan Marpaung dan Taufiq Al Kahfi Marpaung yang telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teruntuk seluruh teman-teman seperjuangan Administrasi Publik stambuk 2015 khususnya dewi, balqis, khairuni, risky febriyani, kak kiki, ardia pori, yesi, ferisman, dinda, sinta, indah monika dan shintia dan semuanya yang tak tersebutkan namanya yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terimakasih untuk teman-teman kontrakan No. 6 C jalan Gurilla gang family terkhusus buat vira, dewi, aini, lusi, vio dan yuni yang selalu memberikan canda dan tawa dan selalu memberikan motivasi bagi saya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih membutuhkan masukan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kelengkapan skripsi ini. Penulis berharap semoga hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya. Penulis berharap skripsi ini mampu menjadi salah bahan referensi untuk acuan pembuatan skripsi selanjutnya agar menjadi lebih baik.

Medan, 01 April 2019

Penulis

Putri Dita Pratama Marpaung

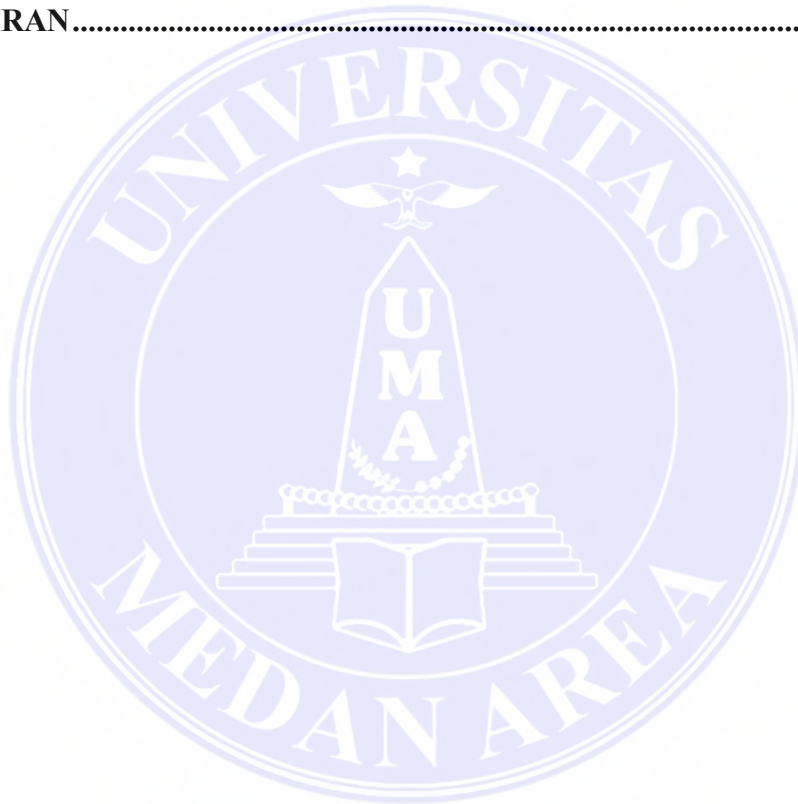
NPM: 15.852.0040

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	vi
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	2
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 4
2.1 Pengertian Persepsi	4
2.2 Pengertian Masyarakat.....	6
2.3 Pengertian Kinerja.....	9
2.4 Pengertian Desa.....	12
2.5 Aparatur Desa.....	13
2.6 Otonomi Desa.....	17
2.7 Kerangka Pemikiran.....	21
2.8 Penelitian Relevan.....	23
 BAB III METODE PENELITIAN	 24
3.1 Jenis Penelitian.....	24
3.2 Sifat Penelitian	24
3.3 Lokasi Penelitian.....	24
3.4 Waktu Penelitian	25
3.5 Informan Penelitian.....	25
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.7 Metode Analisis Data.....	27
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 29
4.1 Hasil Penelitian	29
4.1.1 Gambaran Umum Desa Titi Merah.....	29
4.1.2 Sejarah Desa Titi Merah.....	30
4.1.3 Visi Misi Desa Titi Merah.....	31
4.1.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	32
4.1.5 Jumlah Kartu Keluarga Desa Titi Merah	33

4.1.6 Jumlah Aparatur Desa Titi Merah.....	33
4.1.7 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Titi Merah	34
4.2 Pembahasan.....	43
4.2.1 Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Kepala Desa.....	43
4.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	58
5.1 Simpulan	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	62



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Waktu Penelitian	25
Tabel 2. Jumlah Penduduk sesuai Kelompok Usia Tahun 2018	32
Tabel 3. Jumlah Kartu Keluarga (KK) Desa Titi Merah Tahun 2018	33
Tabel 4. Jumlah Aparatur Desa Titi Merah Tahun 2018	34



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1. Kerangka Pemikiran.....	22
Bagan 2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Titi Merah Tahun 2018.....	36



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa Titi Merah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Desa ini merupakan salah satu desa pemekaran dari Desa Bulan-bulan yaitu merupakan desa induk yang dimekarkan menjadi dua desa, Desa Titi Merah dan Desa Gunung Bandung. Selama ini di Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara pemerintah desa dipegang secara penuh oleh Kepala Desa untuk mengatur keputusan sendiri, bagaimana berjalannya infrastruktur desa, perekonomian desa, serta pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengamanatkan pada pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa”. Selanjutnya pada pasal 26 ayat (1), Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Namun Aparatur Desa dalam keperdulian Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan mengembangkan fasilitas perekonomian desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih dikategorikan kurang baik, dikarenakan kurangnya kerjasama antara masyarakat Desa Titi Merah dengan Kepala Desa ataupun aparat desa setempat dan masih kurangnya pembangunan jalan, kurangnya tanggung jawab menjalankan tugasnya,

kurangnya penyuluhan pendidikan serta perekonomian masyarakat desa yang tertinggal dan fasilitas di Kantor Kepala Desa yang kurang memadai.

Dengan latar belakang yang terjadi seperti dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk memilih judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja kepala desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam meningkatkan kinerja Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

2. Diharapkan untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta cara berpikir khususnya dibidang politik, dan sosial.
3. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Administrasi Publik khususnya.
4. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi ilmiah bagi yang membutuhkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Persepsi

Dilihat dari segi umumnya persepsi adalah pandangan atau pengamatan terhadap suatu objek yang telah diamati oleh seseorang yang berdasarkan latar belakang, pengalaman, dan sikap yang berguna untuk menafsirkan informasi yang meliputi sinyal sistem dalam saraf yang merupakan hasil dari stimulasi organ pengindra. Seperti pendapat Miftah Thoha (2007:141):

Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang didalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami bahwa persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi, dan bukannya suatu tatanan yang benar terhadap situasi.

Selanjutnya persepsi juga merupakan fenomena seseorang atas apa yang dilihat dan dirasakan. Seperti yang dikemukakan Widyatun (2009:112) yaitu Persepsi atau tanggapan adalah proses mental yang terjadi pada diri manusia yang akan menunjukkan bagaimana kita melihat, mendengar, merasakan, memberi, serta meraba (kerja indra) disekitar kita.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan cara pandang yang muncul dari kesadaran seseorang terhadap sesuatu isu yang terjadi. Persepsi dapat dijadikan penambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas. Persepsi memiliki ciri-ciri antara lain: seseorang yang memiliki persepsi yang tinggi akan berpikir luas dan tidak membedakan sesuatu, jadi tidak memandang masalah dari pandangan sempit, seseorang yang memiliki persepsi

yang tinggi akan dengan mudah dapat berinteraksi dengan orang lain secara harmonis, dan mampu bersaing atau berkompetensi dengan sehat.

Menurut Walgito (2010:99) Setiap orang yang akan melakukan persepsi harus memenuhi beberapa syarat:

- 1) Perhatian
Biasanya seseorang tidak akan menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitarnya sekaligus, tetapi akan memfokuskan perhatiannya pada suatu atau dua objek. Perbedaan fokus akan menyebabkan perbedaan persepsi.
- 2) Set
Harapan seseorang akan rangsangan yang timbul, misalnya seseorang pelari akan melakukan start terhadap set akan terdengar bunyi pistol, dan di saat itu ia harus mulai berlari.
- 3) Kebutuhan
Kebutuhan sesaat maupun menetap kepada diri seseorang akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
- 4) Sistem Nilai
Sistem yang berlaku pada suatu masyarakat juga berpengaruh pada persepsi.
- 5) Ciri Kepribadian
Misalnya a dan b bekerja disebuah kantor, si a seseorang yang penakut akan mempersepsikan atasannya sebagai tokoh yang menakutkan, sedangkan si b yang penuh percaya diri menganggap atasannya sebagai orang yang bisa diajak bergaul seperti orang yang lain.
- 6) Gangguan kejiwaan
Hal ini akan menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut dengan halusinasi.

Berdasarkan dengan diketahuinya syarat-syarat yang mempengaruhi persepsi seseorang, sangat ditentukan dari kepribadian, keadaan jiwa, dan harapan dalam melakukan persepsi. Persepsi yang positif mengakibatkan motivasi yang tepat bagi seseorang sedangkan persepsi negatif mengakibatkan motivasi seseorang berkurang atau tidak baik.

David Krech dan Richard.S dalam Djalaludin Rahmat (2009:59)

menjelaskan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu:

1. Faktor Fungsional
faktor yang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan hal lain yang termasuk dalam faktor personal yang menentukan persepsi bukan jenis stimulan tapi karakteristik seseorang yang memberikan respon pada stimulan itu, faktor ini terdiri atas:
 - a. Kebutuhan, kebutuhan sesaat dan kebutuhan menetap pada seseorang akan mempengaruhi atau menentukan persepsi seseorang, dengan demikian perbedaan kebutuhan akan menimbulkan perbedaan persepsi.
 - b. Kesiapan mental
 - c. Suasana Emosi seperti pada saat senang, sedih, gelisah, marah akan mempengaruhi persepsi.
2. Latar Belakang Budaya
Faktor Struktural
Faktor ini berasal dari sifat stimulasi fisik dan sistem saraf individu, yang meliputi:
 - a. Kemampuan berpikir
 - b. Daya tangkap duniawi
 - c. Saluran Daya Tangkap yang ada pada manusia.

Berdasarkan Faktor-faktor di atas maka penulis menyimpulkan pada umumnya persepsi merupakan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu cara belajar, latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman masa lalu, latar belakang dimana tersebut berada sehingga akan menghasilkan persepsi yang bermacam-macam seperti setuju, netral tidak setuju terhadap suatu objek yang diteliti.

2.2 Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling ketergantungan membentuk sebuah sistem dimana mereka saling berinteraksi antar individu-individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Masyarakat juga disebut sekelompok orang yang membentuk sistem semi tertutup atau semi terbuka dimana masyarakat juga sering disebut komunitas yang saling ketergantungan satu sama lain dan di dalam masyarakat pengorganisasiannya berdasarkan mata percaharian.

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Abdul sani (2007:30) yaitu Kata masyarakat berasal dari musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya, berkumpul bersama, hidup bersama saling berhubungan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (Indonesia).

Menurut Auguste Comte dalam Abdul sani (2007:31) “Masyarakat adalah kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan tersendiri”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama disuatu wilayah tertentu dalam waktu yang cukup lama yang saling berhubungan berinteraksi satu sama lain atau bisa juga dikatakan sebagai kelompok orang yang membentuk suatu sistem yang tertutup dimana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut serta dapat diartikan sebagai sekumpulan orang terdiri dari berbagai kalangan yang mampu dan tidak mampu yang tinggal dalam suatu wilayah yang memiliki hukum adat dan peraturan.

Pengertian masyarakat mewujudkan adanya syarat-syarat sehingga disebut dengan masyarakat, yakni adanya pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama dan adanya kerja sama diantara anggota kelompok memiliki pikiran atau perasaan menjadi bagian dari satu kesatuan kelompoknya. Pengalaman hidup bersama ini menimbulkan kerja sama, adaptasi terhadap organisasi dan pola tingkah laku anggota.

Menurut Soerjono Soekanto (2009:22) masyarakat mempunyai ciri pokok yaitu:

1. Manusia yang hidup bersama
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama
3. Mereka sadar bahwa mereka satu kesatuan
4. Mereka merupakan suatu sistem yang hidup yang sama

Menurut Abu Ahmadi dalam Abdul Sani (2007:32) menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada pengumpulan manusia, dan harus banyak, bukan pengumpulan binatang.
2. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama disuatu daerah tertentu.
3. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk kepentingan dan tujuan yang sama.

Berdasarkan pernyataan diatas disimpulkan bahwa ciri-ciri dan syarat masyarakat bukan hanya sekumpulan manusia saja tetapi manusia sebagai individu yang senang untuk berkumpul dan menjalani kehidupan dengan orang lain di suatu kawasan yang ia anggap sesuai dengan dirinya. Dan masyarakat dapat berkembang di lingkungan sosial membentuk sebuah tatanan kehidupan dan kebudayaan yang secara langsung dapat mempengaruhi tingkah laku individu di dalamnya untuk menyesuaikan keadaan dirinya dengan mayoritas orang lain di dalam masyarakat tersebut. Namun, masyarakat yang tinggal bersama dan saling ketergantungan harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan bersama.

Pengertian persepsi masyarakat adalah cara pandang sekelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu yang sama dalam

memberikan kesimpulan dalam suatu obyek berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pengamatan sehingga masyarakat satu dengan yang lain menghasilkan pendapat yang berbeda walaupun obyeknya sama.

2.3 Pengertian Kinerja

Pengertian Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang pegawai untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti pendapat yang dikemukakan Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Menurut Sedarmayanti (2011:260) mengungkapkan bahwa:

Kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti Hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.

a. Indikator Kinerja

Anwar Prabu Mangkunegara (2009:75) mengemukakan bahwa indikator kinerja, yaitu:

1. Kualitas
Kualitas kerja adalah seberapa baik seorang karyawan mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan.
2. Kuantitas
Kuantitas kerja adalah seberapa lama seorang pegawai bekerja dalam satu harinya. Kuantitas kerja ini dapat dilihat dari kecepatan kerja setiap pegawai itu masing-masing.
3. Pelaksanaan tugas.

Pelaksanaan Tugas adalah seberapa jauh karyawan mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan.

4. Tanggung Jawab

Tanggung jawab terhadap pekerjaan adalah kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan.

b. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Tinggi rendahnya kinerja seorang pegawai tentunya ditentukan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) menyatakan bahwa Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (*ability*) dan faktor motivasi (*motivation*). Sedangkan menurut Keith Davis dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) dirumuskan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah :

1. *Human Performance = Ability + Motivation*

2. *Motivation = Attitude + Situation*

3. *Ability = Knowledge + Skill*

a. Faktor Kemampuan

Secara psikologis, kemampuan (*Ability*) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan *reality* (*knowledge + Skill*). Artinya, pegawai yang memiliki IQ rata-rata (IQ 110 – 120) dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai prestasi kerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (*the right man on the right place, the right man on the right job*).

b. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). Sikap mental merupakan kondisi mental yang mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara maksimal. Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara psikofisik (sikap secara mental, fisik, tujuan dan situasi). Artinya seorang pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuan utama dan target kerja yang akan dicapai serta mampu memanfaatkan dan menciptakan situasi kerja.

Menurut A. Dale Timple yang dikutip oleh Anwar Prabu Mangkunegara (2009:15) faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja dapat bersumber dari dalam individu pegawai maupun dari luar individu. Tinggal bagaimana kebijakan organisasi mampu menyelaraskan antara faktor-faktor tersebut.

c. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan faktor kunci dalam mengembangkan potensi pegawai secara efektif dan efisien karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi.

Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Seperti yang dikemukakan Sedarmayanti (2011:261) “Penilaian kinerja adalah sistem formal untuk memeriksa/mengkaji dan mengevaluasi secara berkala kinerja seseorang”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja pegawai sangat perlu dilakukan, karena dapat dijadikan sebagai evaluasi kepala desa untuk proses tindak lanjut setelah mengetahui apa kekurangan dan kelebihan dari kinerja aparat desa maka kepala desa dapat mengetahui tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi kekurangan serta mempertahankan kelebihan tersebut, sehingga akan berdampak pada pengambilan keputusan yang strategis mengenai hasil evaluasi kinerja serta komunikasi yang telah dilakukan oleh atasan dan bawahan sehingga tujuan instansi akan cepat tercapai.

2.4 Pengertian Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan. Seperti yang dikemukakan Widjaja (2002:19):

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, mengamanatkan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dari pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada dinegeri ini luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga, mayoritas penduduknya bekerja dibidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, maka biasanya hubungan kekerabatan antar masyarakatnya terjalin kuat. Para masyarakat nya juga masih percaya dan memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

2.5 Aparatur desa

Dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa, kepala dusun, rukun tetangga dan rukun warga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat desa meliputi semua orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan desa aparatur desa antara lain:

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indonesia. Kepala Desa merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh Camat.

1. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa yang diatur dalam pasal 14 yaitu Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam pasal 14 ayat (1) ini terlihat jelas kepala desa wajib menyelenggarakan pemerintahan desa, urusan pemerintahan dibantu oleh staf nya yang di dalamnya terdapat urusan pelayanan. Urusan pembangunan yaitu pembangunan sarana dan prasarana desa dan urusan kemasyarakatan yaitu gotong royong bersama masyarakat.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
 - d. Menetapkan Peraturan Desa
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa
 - g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Kepala Desa dibantu oleh perangkat-perangkat desa lainnya baik dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa merupakan ujung tombak pemerintahan desa yang melaksanakan tugas khususnya membantu Kepala Desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat desa serta membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa. Kepala Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II setelah mendengar pertimbangan Camat atas usul Kepala Desa, apabila Kepala Desa berhalangan maka sekretaris desa yang menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa sehari-hari.

Berdasarkan pertimbangan bahwa sekretaris desa sebagai kepala sekretariat adalah lebih banyak mengetahui urusan-urusan pemerintahan desa dibandingkan dengan perangkat desa lainnya, maka dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugasnya, sekretaris desa ditetapkan untuk mewakili kepala desanya dalam menjalankan tugasnya. Kepala-kepala urusan diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah tingkat II atas usul Kepala Desa. Syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian sekretaris desa dan Kepala-kepala urusan diatur dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

c. Kepala Dusun

Untuk memperlancar jalannya pemerintahan desa dalam desa dibentuk dusun yang dikepalai oleh kepala dusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Kepala dusun adalah orang

yang mengetuai sebuah dusun, satu wilayah di bawah desa atau unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Kepala Dusun diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati kepada daerah tingkat II atas usul kepala desa. Satu desa biasanya terdiri dari beberapa dusun dan dusun terdiri dari beberapa RT dan RW. Masa jabatan seorang kadus paling lama adalah sekitar lima tahun, mengikuti sistem pemerintahan yang ada di Indonesia saat ini.

d. Rukun Tetangga (RT)

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh kelurahan.

e. Rukun Warga (RW)

Rukun Warga (RW) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi RW:

1. Tugas Pokok RW adalah:
 - a. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
 - b. Membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan kelurahan.
2. RW memiliki fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayahnya.
 - b. Pelaksanaan dan menjembatani hubungan antara RT dan masyarakat dengan pemerintah.

2.6 Otonomi Desa

Menurut Paramitha dkk (Vol. 1, No. 4, Hal 91) Otonomi adalah istilah asing yang paling dekat pengertian kepada swatantra, mungkin tidak sinonim, tetapi seperti yang telah diterapkan hakikatnya adalah sama. Perlu ditambahkan bahwa di samping pembatasan pengaturan rumah tangga sendiri, desa dibebani tugas-tugas baru. Otonomi telah melahirkan antuisme yang luar biasa di tingkat desa, bukan berarti tidak ada persoalan yang serius berasal dari internal desa.

Otonomi desa merupakan pemberian ruang gerak bagi desa dan mengembangkan prakarsa-prakarsa desa termasuk sinergi berbagai aturan dengan potensi dan budaya lokal yang dimiliki desa. Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Desa menjelaskan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Nurcholis (2011:20) isi Otonomi Desa mencakup:

- a. Pertahanan dari ancaman binatang buas/atau gangguan dari daerah luar;
- b. Keamanan dan ketertiban/polisional;
- c. Peradilan;
- d. Pekerjaan umum;
- e. Upacara keagamaan; dan
- f. Pertanian, perikanan, peternakan, perhutanan.

Sebagai masyarakat hukum adat yang dimiliki otonomi maka desa merupakan subyek hukum. Ndraha (1991:7) menjelaskan bahwa desa yang otonom adalah desa yang merupakan subyek hukum, artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Mengambil keputusan atau membuat perauran yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut rumah tangganya;
- b. Menjalankan pemerintah desa;
- c. Memilih kepala desa;
- d. Memiliki harta benda dari kekayaan sendiri;
- e. Memiliki tanah sendiri;
- f. Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri;
- g. Menyusun APPKD (Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Keuangan Desa);
- h. Menyelenggarakan gotong-royong;
- i. Menyelenggarakan peradilan desa;
- j. Menyelenggarakan usaha lain demi kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam menyelenggarakan Otonomi Desa yang bertanggung jawab perlu diadakan perwujudan pertanggung jawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian Otonomi Desa, berupa pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik dengan mengolah sumber daya yang ada didesa.

Pelaksanaan otonomi desa menimbulkan berbagai harapan baik bagi masyarakat, swasta bahkan pemerintah sendiri. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa, terutama Kabupaten dan atau Kota dalam menjalankan kebijakan otonominya. Disinilah perlunya mengidentifikasi berbagai dimensi/faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan otonomi desa.

Otonomi desa membuka peluang dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan termasuk fungsi-fungsi obyektif masyarakat. Ndraha (2003:442-445) mengungkap fungsi-fungsi obyektif masyarakat sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai sumber daya (subkultur ekonomi) seperti:
 - a. membeli semurah mungkin
 - b. menjual seuntung mungkin

- c. membuat sehemat mungkin
2. Penciptaan keadilan dan kedamaian (subkultur pemerintahan) seperti:
 - a. berkuasa semudah mungkin
 - b. menggunakan kekuasaan seefektif mungkin
 - c. mempertanggung jawabkan penggunaan kekuasaan seformal mungkin
3. Kontrol terhadap kekuasaan.

Tugas utama pemerintah dalam rangka Otonomi Desa adalah menciptakan kehidupan demokratis, memberi pelayanan publik dan sipil yang cepat dan membangun kepercayaan masyarakat menuju kemandirian desa. Untuk itu desa tidak dikelola secara teknokratis tetapi harus mampu memadukan realita kemajuan teknologi yang berbasis pada sistem nilai lokal yang mengandung tata aturan, nilai, norma, kaidah, dan pranata-pranata sosial lainnya.

Selanjutnya Kaloh (2003:72) menegaskan bahwa faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi desa ialah manusia sebagai pelaksana yang baik. Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintah baik daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

Selanjutnya, faktor yang kedua ialah kemampuan keuangan desa yang dapat mendukung pembiayaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Mamesah (2002:23) yang menyebutkan bahwa dalam kehidupan suatu negara, masalah keuangan negara sangat penting. Semakin baik keuangan suatu negara, maka semakin stabil pula kedudukan pemerintah dalam negara

tersebut. Sebaliknya kalau kondisi keuangan negara buruk, maka pemerintah akan menghadapi berbagai kesulitan dan rintangan dalam menyelenggarakan segala kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

Faktor ketiga ialah anggaran, sebagai alat utama pada pengendalian keuangan desa, sehingga rencana anggaran yang dihadapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus tepat dalam bentuk dan susunannya. Anggaran berisi rancangan yang dibuat berdasarkan keahlian dengan pandangan ke muka yang bijaksana, karena itu untuk menciptakan pemerintah desa yang baik untuk melaksanakan otonomi desa, maka mutlak diperlukan anggaran yang baik pula.

Faktor peralatan yang cukup memadai, yaitu setiap alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah desa. Peralatan yang baik akan mempengaruhi kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya, seperti alat-alat kantor transportasi, alat komunikasi dan lain-lain. Namun demikian, peralatan yang memadai tersebut tergantung pula pada kondisi keuangan yang dimiliki daerah, serta kecakapan dari aparat yang menggunakannya.

Faktor organisasi dan manajemen baik, yaitu organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi yang jelas berupa susunan satuan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang, serta hubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Manajemen merupakan proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Mengenai arti penting dari manajemen terhadap penciptaan suatu pemerintahan

yang baik, Mamesah (2002:32) mengatakan dari pimpinan desa yang bersangkutan, khususnya tergantung dari pimpinan desa yang bersangkutan, khususnya tergantung kepada Kepala Desa yang bertindak sebagai Manajer Desa.

2.7 Kerangka Pemikiran

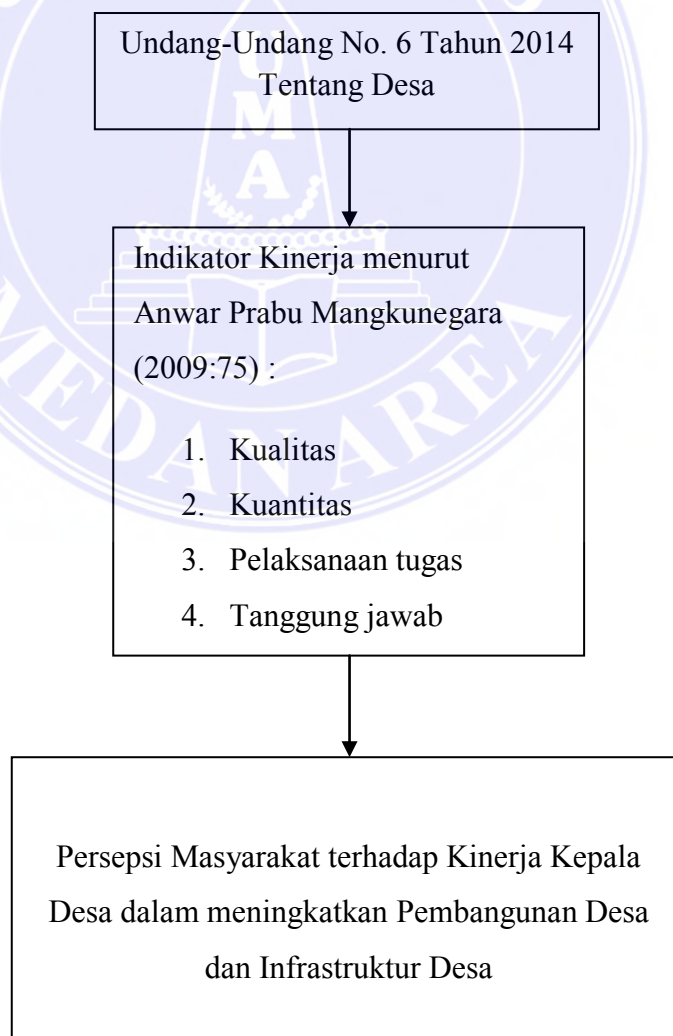
Persepsi merupakan cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang terhadap suatu isu yang terjadi. Persepsi dapat dijadikan penambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas. Sedangkan masyarakat merupakan bagian pendukung yang terpenting agar suatu Negara dapat terwujud. Jadi persepsi masyarakat merupakan cara pandang yang dilakukan oleh masyarakat berguna untuk memberikan sebuah kesimpulan bagaimana keadaan yang sedang terjadi.

Otonomi desa merupakan kewenangan desa yang otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan Otonomi Desa mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain: menumbuhkan kembangkan desa dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian desa dan meningkatkan daya saing desa dalam proses pertumbuhan. Kemudian dampak pemberian otonomi desa tidak hanya terjadi pada organisasi atau administratif lembaga pemerintahan desa saja melainkan berlaku juga pada masyarakat (publik) badan atau lembaga swasta dalam berbagai bidang. Otonomi desa tidak dipandang semata-mata sebagai hak dan wewenang, melainkan tanggung jawab sehingga bagi desa dituntut mengembangkan sumber daya manusia.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur berbagai persoalan yang menyangkut kebutuhan tentang desa, baik tentang tata cara pengelolaan desa serta untuk pengelolaan Aparatur Desa.

Persepsi masyarakat Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara mengenai kinerja kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Terlebih lagi bagi masyarakat yang ada di desa tersebut harus memberikan sebuah pandangan yang positif mengenai kinerja yang dilakukan pemerintah sekaligus membangun keadaan otonomi desa tersebut agar menjadi lebih baik.

Bagan 1. Kerangka Pemikiran



2.8 Penelitian Relevan

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja Kepala Desa dalam meningkatkan Pembangunan Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Dwi Lucita Sari, Adelina Hasyim, Yunisca Nuralisa (2016), penelitian yang diberi judul “Persepsi masyarakat terhadap kinerja aparatur desa dalam meningkatkan pelayanan publik di Desa Bumi Agung Marga Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara” ini menunjukkan hasil dari persepsi masyarakat terhadap kinerja aparatur desa dalam meningkatkan pelayanan publik adalah cenderung kurang paham karena pelayanan publik khususnya pelayanan reguler ini belum memuaskan dan belum berjalan secara optimal sesuai dengan Undang-Undang. Namun masyarakat masih berharap adanya pelayanan publik yang diselenggarakan secara mudah, cepat dan bersahabat.

Partisipasi aparatur desa serta tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan publik di desa dengan cara memperbaiki cara kerja, merubah budaya kerja, dan memiliki kualitas kinerja yang baik serta tanggung jawab akan hak dan kewajiban sebagai aparatur desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk melihat pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi data (gabungan), analisis data bersifat kualitatif/induktif dan hasil peneliti kualitatif lebih menekankan makna pada generalisasi.

3.2 Sifat Penelitian

Menurut Sugiyono (2010:11) metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kepala Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara yang beralamat di jalan Besar Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

3.4 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan, dilaksanakan pada bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, daftar uraian jadwal penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Uraian Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2018				2019			
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1	Penyusunan dan pengajuan judul								
2	Pengajuan dan penyusunan proposal								
3	Seminar proposal								
4	Perbaikan proposal								
5	Penelitian								
6	Penyusunan Skripsi								
7	Seminar Hasil								
8	Perbaikan Skripsi								
9	Sidang meja hijau								

3.5 Informan Penelitian

a. Informan Kunci

Informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci yaitu Kepala Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

b. Informan Utama

Informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama yaitu staf-staf pegawai kantor Kepala Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

c. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi informan tambahan yaitu masyarakat Desa Titi Merah.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2010:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data atau informasi yang mendukung tujuan penelitian, penulis menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap obyek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan dilapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan acara untuk berkaitan dengan permasalahan penelitian. Menurut Sutrisno Hadi Sugiyono (2010:166) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis

dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara penelitian dengan subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan. Menurut Esterberg dalam sugiyono (2010:317) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

c. Dokumentasi

Menurut sugiyono (2010:24) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.7 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2010:345) mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi: *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (verifikasi dan penarikan kesimpulan).

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di era tema, polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data biasanya dalam membentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, dan mencarinya bila perlu.

3. Penarik Kesimpulan (*conclusion drawing verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Hanif, Nurcholis. (2011). *Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kaloh.(2003). *Kepala daerah pola kegiatan kekuasaan, dan perilaku kepala daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah*. Jakarta: PT.Gramedia pustaka utama.
- Mamesah, Dkk.(2002). *Pemerintahan daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mangkunegara, A.P.(2009). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu. (1991). *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- (2003). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jilid 1-2. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahmat, Djalaludin. (2009). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Sani, Abdul. (2007). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sedarmayati. (2011). *Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar M.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soejono. (2009). *Dasar-dasar kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan*. Yogyakarta: Ombak.
- Toha, Miftah.(2007). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.
- Walgito, Bimo. (2010). *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Widyatun.(2009). *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widjaja.A.W.(2002). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Sumber Jurnal Jurnal

Paramitha, Dkk. Kinerja Aparat Pemerintah Dalam Rangka Otonomi Desa (Studi Pada Gulun, Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 1, No4, Hal 91. 2016.

Sari, Dkk. Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Pendidikan*. Vol 3 No 5 Hal 12. 2016.

Sumber Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sumber lainnya:

1. Bapak Darmawi selaku Kepala Desa sebagai informan kunci
2. Bapak Amirsyah selaku Sekretaris Desa sebagai informan utama
3. Bapak Umar Dani selaku Kepala Dusun III sebagai informan utama
4. Ibu Rohani selaku masyarakat desa Titi Merah sebagai informan tambahan
5. Ibu Nurlela selaku masyarakat desa Titi Merah sebagai informan tambahan
6. Ibu Asniah selaku masyarakat desa Titi Merah sebagai informan tambahan
7. Ibu Lina selaku masyarakat desa Titi Merah sebagai informan tambahan

LAMPIRAN



Foto bersama Bapak Darmawi selaku Kepala Desa Titi Merah



Foto bersama Bapak Amirsyah selaku Sekretaris Desa Titi Merah



Foto saat wawancara dengan Bapak Darmawi selaku Kepala Desa Titi Merah



Foto saat wawancara dengan Bapak Amirsyah selaku Sekretaris Desa Titi Merah



Foto saat wawancara dengan Bapak Umar Dani selaku Kepala Dusun III Desa Titi Merah



Foto saat wawancara dengan Ibu Nurlela selaku masyarakat Desa Titi Merah



Foto saat wawancara dengan Ibu Asniah selaku masyarakat Desa Titi Merah



Foto saat wawancara dengan Ibu Rohani selaku masyarakat Desa Titi Merah



Foto saat wawancara dengan Ibu Lina selaku masyarakat Desa Titi Merah



Foto bersama Bapak Kepala Desa dan Bapak Sekretaris Desa Titi Merah



Foto Kantor Kepala Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara